

BIBLIOGRAPHY

1. Literature Books

- Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta. 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara Darurat*, Raja Grafindo, Jakarta, 2007.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2010.
- Doludjawa, Linus. *Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-Undangan*, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM, 2005.
- Farida, Maria I. *Ilmu Perundang-undangan Dasar-Dasar dan Perkembangannya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998.
- Gita Putri Damayana, Diani dkk., *Kajian Reformasi Regulasi di Indonesia: Pokok Permasalahan dan Strategi Penangannya*, Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK), Jakarta Selatan, 2019.
- Manan, Bagir. *Dasar-dasar Konstitusional Peraturan Perundang-undangan Nasional*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 1994.
- Manan, Bagir dan Magnar, Kuntana. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi Revisi, Alumni. Bandung, 1997.
- Manan, Bagir. *Teori dan Politik Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004.
- Martini & Rahman, Abdul. *Sistem Hukum Indonesia*, CV Jejak, Sukabumi, 2023.
- Mochtar, Zainal A. *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*, EA BOOKS. Yogyakarta, 2022.
- Mochtar, Zainal A dan Hiariej, Eddy O.S *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Red & White, Jakarta, 2021.
- M.D., Mahfud., *Membangun politik hukum, Menegakkan Konstitusi*, LP3ES, Jakarta, 2006.
- M.D., Mahfud., *politik hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2020;
- Huda, Ni'matul & Nazriyah, R. *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Nusa Media, Bandung, 2019

- Huda, Ni'matul, Politik Hukum dan Pembangunan Sistem Hukum Nasional, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2023.
- Kelsen, Hans. General Theory of Law and State, Russel & Russel, New York, 1961.
- Marzuki, Peter, M, Penelitian Hukum Edisi Revisi, KENCANA, Jakarta, 2023.
- Pusat PUU BK DPR RI, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Badan Keahlian DPR RI, 2022.
- Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Tim Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Menggagas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi di Indonesia: Prosiding Forum Akademik Kebijakan Reformasi Regulasi 2019, Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK), Jakarta Selatan, 2019.
- Suteki, Politik Hukum Hak atas Air, Thafamedia, Yogyakarta, 2020.
- Suhariyono, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik, Papas Sinar Sinanti, Depok, 2022.
- Wahjono, Padmo. Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- Wahjono, Padmo. Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Wulandari, Liestiarini. Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2019, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta Timur, 2019.

2. Laws and Regulations

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801).
- Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 900 Tahun 2023).
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1185/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VI/2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1142/PL.021.2-Kpt/06/KPU/IXI/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1185/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VI/2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

3. Scientific Journal

Fathorrahman, Peraturan Delegasi dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan, Jurnal Rechts Vol. 7 No. 2., 2018

Novian, Rizky H & Lupita, Esa S, Reformasi Regulasi dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, KNAPHTN-HTN, Vol.1 No.1., 2023;

Purwadi, Ari. Pokok-Pokok Strategi Pembangunan Hukum di Indonesia, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 3 No. 20., 1990.

Teuku, Radhie M. Pembaharuan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional, Majalah Prisma, No. 6, Tahun II, 1973.

Simarmata, Jorawati. Tumpang Tindih Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Legislasi Indonesia, Vol. 15 No. 3., 2018

Sopiani & Mubaroq, Zainal, politik hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 17 No. 2., 2020.

4. Research Report (Thesis, Thesis, Dissertation)

S. Attamimi, A. Hamid. Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara. Disertasi, Universitas Indonesia. Fakultas Pascasarjana, 1990.

Siahaan, Maruarar. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang Studi tentang Mekanisme Checks and Balances di Indonesia, Disertasi, Universitas Diponegoro, 2011

5. Media Online

APHTN-HAN merupakan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, Rekomendasi ini di kutip dari APHTN-HAN, 21 Mei 2022, Pokok-Pokok Pikiran dan Rekomendasi

Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (KNAPHTN-HAN) 2022 Bandung, Bali 19-21 Mei 2022,
<https://aphtnhan.id/assets/images/pdf/REKOMENDASI%20KNAPHTN-HAN%202022%20%20DISEBARLUASKAN%20.pdf>, diakses pada 16 April 2025

Channel Youtube Universitas Brawijaya, 25 November 2020, Live Pengukuhan Profesor Universitas Brawijaya 2020 #4,
<https://www.youtube.com/live/sGBWTOixcUI?si=4hA-9MYBzYpuYIsP&t=4517>, diakses pada 14 April 2025

Erika, Dian., dan Ratna, 29 Oktober 2019, Pakar: Tak Perlu Ada Pusat Legislasi Nasional, <https://republika.co.id/share/q04wl6428>, diakses pada 8 Oktober 2024 ;

Ikhsanudin, Arief, 18 Januari 2019, Mahfud MD Dukung Ide Jokowi soal Badan Legislasi Nasional, <https://dtk.id/NHiuAW>, diakses pada 8 Oktober 2024;

Humas Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, upload 26 Agustus 2019, Presiden Jokowi Kritik Pembuatan Undang-Undang Yang Masih Bertele-tele, <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-kritik-pembuatan-undang-undang-yang-masih-bertele-tele>, diakses pada 23 Maret 2025.

JDIHN Indonesia, 26 November 2020, Perkembangan terkini JDIHN, <https://youtu.be/zaGeqPpLrk?si=rcGgLK2I5oCnsOqa&t=324>, diakses pada 23 Maret 2025

Komisi Pemilihan Umum, 27 Desember 2018, Ini Media Penyiaran Debat Capres-Cawapres 2019,
<https://www.kpu.go.id/berita/baca/7004/Komisi-Pemilihan-Umum>, diakses pada 8 Januari 2025;

Kementerian Sekretariat Negara, 11 Oktober 2019, Presiden Mengesahkan Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Perundangan, Sekretariat Negara,

https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_mengesahkan_undang_undang_perubahan_atas_undang_undang_nomor_12_tahun_2011_tentang_pembentukan_peraturan_perundang_undangan#:~:text=Presiden%20Joko%20Widodo%20pada%20tanggal,tentang%20Pembentukan%20Peraturan%20Perundang%2Dundangan, diakses pada 14 April 2025

Sekretariat Presiden, 26 Agustus 2019, Presiden Membuka Orientasi Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Anggota Parlemen Terpilih Periode 2019-2024,
<https://youtu.be/pNtnD8qP8Q?si=vjmdk2Db5K6K6HDq&t=2>, diakses pada 23 Maret

tvOneNews, 18 Januari 2019, [FULL] Debat Capres Cawapres Pilpres 2019, <https://youtu.be/lCeUC8tacQM?si=HAS4uROflfpBkGVR>, diakses pada 8 Januari 2025.

